

	News Title : Bursa CPO dan Realitas Pasar	
	Media Name : kompas.id	Journalist : Istimewa
	Publish Date : 16 October 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 4,500,000
	Resources :	Ads Value : 1,500,000
	Section/Rubrication : Opini	Topic : Bursa CPO

Bursa CPO dan Realitas Pasar

Setelah sempat tertunda-tunda, kita akhirnya meluncurkan bursa CPO, 13 Oktober lalu. Apakah tujuan menjadikan Indonesia barometer harga CPO dunia segera terwujud?

Audio Berita 3 menit

Dian REDAKSI
16 Oktober 2023 05:05 WIB - 2 menit baca

A Teks



©Kompas/Kaca Niche
Petarja memindahkan sawit petani ke atas truk untuk dikirim ke pabrik di Desa Bukit Raja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pangasinan, Kalimantan Tengah, April 2021.

Keinginan Indonesia bisa menjadi barometer harga CPO dunia adalah hal wajar karena Indonesia produsen terbesar CPO, menyumbang 85 persen produksi CPO dunia pada 2022. Selama ini, Indonesia bergantung pada bursa Rotterdam dan Malaysia dalam penentuan harga sawit.

Dengan adanya [bursa CPO](#) di dalam negeri, penentuan harga CPO diharapkan lebih adil, transparan, akuntabel, dan real time (Kompas, 14/10/2023). Persoalannya, bagaimana keinginan itu bisa diwujudkan jika hanya sebagian kecil, yakni sekitar 10 persen, CPO yang diperdagangkan lewat bursa?

Akhirnya, harga yang terjadi juga tidak mewakili kondisi riil pasar yang sebenarnya. Hal ini tampaknya juga disadari oleh otoritas bursa. Berkaca pada pengalaman bursa CPO Malaysia, perlu belasan tahun untuk menjadi seperti sekarang. Komitmen dan dukungan semua pihak penting di sini.



©Kompas/Kaca Niche
Foto perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Sawit Sumbermas Sarwa Tbk (SSS) di Pangkajene-Bea, Kalimantan Tengah, April 2021.

Baca juga: [81 Milik Bursa CPO, Harga Acuan CPO Ditargetkan Terbebas pada 2024](#)

Bagaimana "memaksa" pelaku industri sawit masuk bursa menjadi salah satu tantangan. Penyebabnya, selain keikutsertaan di bursa bersifat sukarela, kalangan pengusaha umumnya sudah terlanjur nyaman dengan pola business to business secara langsung yang berlaku selama ini sehingga perlu insentif lebih untuk "memaksa" mereka bertransaksi lewat bursa.

Saat ini memang sudah ada 18 perusahaan yang bergabung di bursa CPO ini, terutama perusahaan yang selama ini sudah melalui di Bursa Efek Indonesia, tetapi tak ada jaminan mereka akan bertransaksi di bursa CPO. Selain terbiasa B-to-B, mereka umumnya sudah terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir sehingga produk akhir bukan lagi CPO, melainkan olahan.

Yang pasti, kehadiran bursa ini harus bisa menjadi titik awal atau bagian penting dari pembenahan industri sawit nasional secara keseluruhan. Kehadiran bursa harus memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan di dalamnya, termasuk peningkatan kesejahteraan petani yang selama ini sering menjadi korban permainan harga karena posisi tawar yang rendah.



©Kompas/Kaca Niche
Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia (erry Samudra) (kiri) memberikan keterangan pers pada Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan yang diselenggarakan Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPPO), di Kota Kumbha, India, 27 September 2023. Indonesia dan Malaysia melancarkan kampanye regional tentang sawit yang cukup efektif di pasar menengah India.

Baca juga: [Ungkit Ekspor Minyak Sawit, Indonesia Sasar Kelas Menengah](#)

Bagi perusahaan, keikutsertaan di bursa CPO, menurut pengamat yang dikutip Kompas.id, akan membuat perusahaan lebih dihargai dan diuntungkan karena biaya transaksi dan pajak ekspor saat harga CPO tinggi tak diberlakukan lagi.

Bagi pemerintah, bursa CPO diharapkan juga menghadirkan data lebih akurat dan update mengenai lalu lintas perdagangan sawit. Selama ini, meski nilai ekspor melorot, penerimaan negara belum maksimal. Kontribusi industri sawit masih jauh di bawah potensi sebenarnya akibat kelemahan sistem, permainan oknum, kenakalan perusahaan sawit, dan lain-lain.

Lebih penting lagi, kehadiran bursa secara tak langsung harus mendorong terbentuknya industri sawit yang lebih berkelanjutan dan pertumbuhan industri lainnya. Penegakan hukum lebih tegas harus diterapkan terhadap pelanggar. Jangan sampai kelestarian lingkungan dikorbankan hanya karena nilai ekonomi CPO dan produk turunan yang tinggi.